

Peran Pemimpin Informal Etnis Suku Bajau Dalam Pengembangan Pariwisata Di Gugusan Kepulauan Derawan Kabupaten Berau, The Role of Informal Leaders of the Bajau Ethnic Group in Tourism Development in the Derawan Archipelago, Berau Regency

Dian Yusril Alamsyah¹, Mohammad Taufik², Letizia Dyastari³

¹ Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

² Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

³ Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 13, No. 04

Page : 129-137

Published : 2025

KEYWORDS

Informal Leader, Bajau Ethnic Group, Tourism

CORRESPONDENCE

Phone: +6281327817497

E-mail:

dianalamsyaho45@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemimpin informal suku Bajau dalam pengembangan pariwisata di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau. Pemimpin informal dalam komunitas Bajau memainkan peran krusial dalam menggerakkan komunitas untuk berpartisipasi dalam sektor pariwisata, termasuk mengelola destinasi wisata, meningkatkan keterampilan komunitas, dan melestarikan warisan alam dan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pemimpin informal, tokoh komunitas, dan penduduk lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin informal Bajau secara signifikan memotivasi partisipasi komunitas dalam pengembangan pariwisata, meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan pelatihan dan pendidikan formal. Sebagai fasilitator, para pemimpin ini menciptakan forum diskusi yang efektif untuk menyuarakan aspirasi komunitas dalam pengelolaan pariwisata. Selain itu, mereka bertindak sebagai mobilisator, berhasil mendorong partisipasi aktif dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata maritim, meskipun keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pariwisata yang tidak memadai menjadi tantangan.

Pemimpin informal dari kelompok etnis Bajau di Kepulauan Derawan memainkan peran penting dalam pengembangan pariwisata dengan memajukan keragaman budaya lokal, meningkatkan perekonomian komunitas, dan mempromosikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan peran ini, diperlukan dukungan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, dan peraturan yang lebih mendukung bagi sektor pariwisata lokal. Penulis diharuskan menyertakan abstrak terstruktur dalam pengajuan mereka, yang meliputi; Tujuan (wajib), Desain/metodologi/pendekatan (wajib), Temuan/hasil (wajib), Batasan penelitian/implikasi (jika berlaku), Implikasi praktis (jika berlaku), Implikasi sosial (jika berlaku), Keaslian/nilai (wajib).

INTRODUCTION

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisata menekankan bahwa sektor pariwisata berperan penting dalam meratakan pembangunan, menciptakan peluang usaha, serta menyediakan keuntungan baik secara ekonomi maupun sosial, dan juga dapat menangani tantangan yang muncul di tingkat lokal, nasional, dan global. Indonesia, yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mempunyai banyak lokasi yang bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik dan memberikan manfaat bagi negara.

Salah satu daerah yang menunjukkan kekayaan alam tersebut adalah Kepulauan Derawan yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Berau mempunyai berbagai potensi usaha, khususnya dalam bidang pariwisata yang menjadi keunggulan daerah tersebut. Untuk mendukung perkembangan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Berau juga menawarkan kesempatan bagi investor di bidang pariwisata, perkebunan, perikanan, dan pertanian.

Walaupun ada banyak tempat wisata yang menjanjikan, pengelolaan destinasi di Berau termasuk Kepulauan Derawan masih belum maksimal. Namun, pemerintah dan pelaku usaha terus berusaha mengembangkan kawasan ini menjadi destinasi wisata unggulan dengan menyediakan fasilitas seperti resort, homestay, makanan lokal, dan aktivitas wisata bahari seperti menyelam dan snorkeling. Pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk menarik lebih banyak wisatawan serta memperkuat posisi Kabupaten Berau sebagai salah satu tujuan wisata utama di Indonesia.

Salah satu cara nyata untuk mendukung adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat lokal dalam membangun homestay. Ini memungkinkan warga untuk berkontribusi dalam menyediakan tempat tinggal bagi para wisatawan. Suku Bajau, yang merupakan kelompok migrasi terbaru dari utara seperti Filipina, telah lama tinggal di pesisir Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Hidup sebagai komunitas yang bergantung pada laut, mereka sangat terikat dengan kehidupan maritim. Namun, pola hidup yang tertutup dan kurang adaptif terhadap perubahan sosial di darat menyebabkan rendahnya partisipasi mereka dalam pembangunan, khususnya di sektor pariwisata, sehingga mereka belum sepenuhnya merasakan dampak ekonomi.

Di Kepulauan Derawan, mayoritas warga Bajau bekerja sebagai nelayan, terutama di Kecamatan Pulau Derawan. Istilah Kepala Suku merujuk pada pemimpin utama dalam suatu kelompok etnik atau suku. Kepala Suku memiliki power yang diakui secara sah, yang diperoleh melalui tradisi, penunjukan, atau pengakuan dari komunitas. Menurut Koentjaraningrat, suku bangsa ialah kelompok yang terikat oleh kesadaran serta identitas budaya dan bahasa yang sama, yang memperkuat kesatuan di antara mereka.

Kepala Suku adalah pemimpin yang memiliki kekuatan dan kemampuan memimpin suatu kelompok yang terikat oleh kesadaran dan identitas kebudayaan (suku bangsa). Kepemimpinan Kepala Suku bersifat karismatik. Aliansi antar pemimpin jarang terjadi karena adanya permusuhan dan kecurigaan turun-temurun akibat konflik dan pembunuhan di luar peperangan. Hubungan erat terjadi di dalam wilayah konfederasi antar pimpinan sub-konfederasi, menjaga aliansi tetap terjaga dan saling membutuhkan. Secara filosofis, Kepala Suku mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa (*volkgeist*)

suatu masyarakat dari zaman ke zaman. Setiap bangsa memiliki adat atau kebiasaan yang berbeda, yang menjadi unsur penting dan identitas pembeda antar kelompok bangsa di dunia.

Kondisi minimnya sarana dan prasarana serta keberadaan kebudayaan tradisional membuat pemimpin informal, seperti tokoh masyarakat Suku Bajau, lebih berpengaruh dibanding kepala desa formal. Pemimpin informal memiliki legitimasi langsung dari masyarakat dan sangat memengaruhi partisipasi warga dalam pembangunan. Oleh karena itu, peran pemimpin informal Suku Bajau sangat penting dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi lokal di Kepulauan Derawan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mengkaji “Peran Pemimpin Informal Etnis Suku Bajau dalam Pengembangan Pariwisata di Gugusan Kepulauan Derawan Kabupaten Berau”.

THEORETICAL FRAMEWORK

1. Peran

Menurut Merton (2000), peran adalah pola perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang berada dalam posisi sosial tertentu. Peran ini menunjukkan interaksi sosial di mana individu bertindak berdasarkan aturan

dan harapan bersama, seperti yang dilakukan oleh dokter, guru, atau orang tua, yang menjalankan tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing dalam tatanan sosial.

Ahmad dan Taylor (2009) berpendapat bahwa lingkungan organisasi memengaruhi harapan perilaku individu melalui norma atau tekanan tertentu. Seseorang menangkap dan bereaksi terhadap pesan tersebut, namun masalah dapat muncul jika pesan tersebut tidak jelas, sulit dimengerti, atau tidak sesuai dengan kemampuan penerima, sehingga tanggapan bisa jadi tidak sesuai harapan.

Rivai (2004) menjelaskan bahwa peran adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi

atau jabatan yang dimilikinya. Peran dan status sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Soekanto (2012) menjabarkan bahwa konsep peran mencakup persepsi peran, yaitu cara individu melihat tindakan yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu; ekspektasi peran, yaitu pandangan orang lain tentang bagaimana seharusnya seseorang bertindak; dan konflik peran, yang terjadi saat individu menghadapi tuntutan peran yang saling bertentangan dan sulit dipenuhi secara bersamaan

Rivai (2004) menyatakan bahwa peran adalah tindakan yang diharapkan dan diatur dari seseorang berdasarkan jabatan yang dimiliki. Status sosial dan peran saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Soekanto (2012) menggambarkan konsep peran sebagai mencakup bagaimana individu melihat tindakan yang harus diambil dalam kondisi tertentu, yaitu persepsi peran; ekspektasi peran, yang adalah pandangan orang lain mengenai perilaku yang seharusnya; dan konflik peran, yang muncul ketika seseorang berhadapan dengan tuntutan yang bertentangan dan sulit untuk dipenuhi sekaligus

Robinson (2018) mencatat bahwa indikator peran terdiri dari motivator, fasilitator, dan mobilisator. Motivator memberikan semangat dan dorongan untuk mencapai tujuan serta membantu meningkatkan rasa percaya diri. Fasilitator memudahkan komunikasi dan kerja sama dalam kelompok, serta memastikan fokus pada tujuan bersama. Sementara itu, mobilisator mendorong individu atau kelompok untuk bertindak dengan cara mengelola sumber daya dan menjaga semangat dalam mencapai tujuan bersamanya. Ketiga peran ini sangat penting bagi keberhasilan organisasi atau komunitas.

2. Pemimpin

Seorang pemimpin adalah orang yang dapat memimpin dan mengubah pandangan atau pendapat orang lain atau kelompok tanpa perlu menjelaskan alasan. Mereka menjalankan fungsi dalam sistem tertentu, tetapi memiliki posisi resmi tidak selalu berarti seseorang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan lebih berkaitan dengan

keterampilan, pengetahuan, dan pengaruh individu. Oleh karena itu, tidak hanya pemimpin resmi yang dapat menunjukkan kualitas kepemimpinan. Selain itu, pemimpin memiliki keunggulan khusus di bidang tertentu, yang membantu mereka untuk mendorong orang lain bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin juga memiliki peran penting dalam mengatur keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi, baik yang formal maupun non-formal, karena kualitas pemimpin sangat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mengelola dan melaksanakan tugasnya dengan efektif.

3. Pengembangan

Pengembangan merupakan usaha untuk meningkatkan suatu wilayah dengan menjaga yang sudah ada atau menciptakan hal-hal baru. Hadinoto (1996) menjelaskan bahwa pengembangan tempat wisata mencakup beberapa elemen penting. Pertama, daya tarik wisata yang menjadi fokus utama, seperti kekayaan alam, budaya, dan manusia. Kedua, promosi dan pemasaran yang bertujuan untuk memperkenalkan daya tarik serta cara untuk mengunjunginya. Ketiga, pasar wisata yang melibatkan perilaku, kebutuhan, dan motivasi pengunjung. Keempat, transportasi yang mempengaruhi jumlah dan lokasi pengembangan pariwisata. Kelima, masyarakat yang menerima wisatawan dan menyediakan akomodasi serta layanan tambahan. Suwanto (1997) menambahkan bahwa destinasi wisata dan keindahan alam, infrastruktur seperti jalan dan energi listrik, serta fasilitas seperti hotel dan restoran sangat penting untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah tujuan.

4. Kepemimpinan Informal

Kepemimpinan informal adalah kepemimpinan yang tidak ditetapkan secara resmi melalui pemilihan atau pengangkatan. Pemimpin informal diakui karena keunggulan fisik, psikologis, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki, serta pengaruhnya dalam organisasi atau

masyarakat. Mereka tidak memiliki kewenangan formal, namun mampu mempengaruhi anggota melalui visi, perilaku, dan teladan. Kepemimpinan ini biasanya muncul karena faktor kekayaan, pendidikan, agama, atau keturunan, dan berkembang di berbagai bidang. Pemimpin informal sering berperan sebagai penasihat, tokoh masyarakat, atau pemuka agama, meski tanpa jabatan resmi, tetapi tetap dihormati dan diakui.

5. Syarat Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto (1983), masyarakat memiliki beberapa fungsi utama, yaitu: (1) Fungsi adaptasi, yaitu kemampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan sosialnya; (2) Fungsi integrasi, yaitu usaha menjaga koordinasi dan keterpaduan antar bagian sistem sosial agar tetap harmonis; (3) Fungsi mempertahankan, yaitu menjaga pola-pola hubungan antara masyarakat dengan kebudayaannya agar tetap lestari; dan (4) Fungsi pencapaian tujuan, yaitu upaya masyarakat sebagai sistem sosial dalam mewujudkan tujuan bersama melalui peran dan kontribusi setiap anggotanya. Keempat fungsi ini penting untuk kelangsungan hidup masyarakat.

6. Suku Bajau

Suku Bajau dikenal sebagai pengembara laut atau gipsi laut karena kebiasaan berpindah-pindah dan keahlian menyelam. Mereka tersebar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dengan permukiman di Pulau Nain, Pulau Rajuni, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Bajau masih memegang kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersemayam di terumbu karang, sehingga penangkapan ikan di area tersebut harus didahului ritual khusus. Pola hidup nomaden menyebabkan perubahan budaya dan tantangan dalam mempertahankan identitas asli, apalagi di tengah pengaruh globalisasi yang menekan identitas lokal mereka.

7. Dampak Pengembangan Pariwisata

Pariwisata merupakan aktivitas

yang melibatkan masyarakat secara langsung dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Karena sifatnya yang dinamis dan melibatkan banyak pihak, pariwisata menjadi fokus penting dalam kajian dampaknya terhadap masyarakat. Dampak pariwisata bisa bersifat positif maupun negatif. Peningkatan kunjungan wisatawan dapat memberikan manfaat ekonomi, seperti membuka lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, sekaligus mendukung pelestarian budaya dan lingkungan. Masyarakat lokal memiliki peran krusial dalam keberhasilan suatu objek wisata karena budaya mereka menjadi daya tarik utama. Selain itu, dukungan masyarakat berupa penyediaan sarana dan tenaga kerja sangat penting untuk kelangsungan operasional wisata. Kusudianto (1996) menekankan bahwa destinasi wisata yang dirancang dengan baik tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Namun, tanpa perencanaan dan pengelolaan yang tepat, pariwisata dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan dampak negatif sosial ekonomi. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam pengembangan wisata sangat penting agar manfaat yang diperoleh maksimal dan dampak negatif dapat diminimalisir.

8. Dampak Ekonomi Pariwisata

Menurut Cohen (dalam Pitana dan Diarta, 2009), dampak pariwisata terhadap sosial ekonomi masyarakat lokal terbagi dalam delapan kategori, antara lain penerimaan devisa, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, harga dan tarif, distribusi keuntungan, kepemilikan, pembangunan, dan pendapatan pemerintah. Ritchie (1987) menambahkan dampak seperti pengurangan ketergantungan ekonomi, mobilitas tenaga kerja, perubahan jenis pekerjaan, transformasi nilai lahan, perubahan taraf hidup, dan sistem politik.

Robert Cristie Mill (1990) menjelaskan dampak positif pariwisata meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, penguatan nilai tukar mata uang, serta peningkatan kemampuan manajerial masyarakat. Namun, dampak negatifnya antara lain kenaikan biaya pembangunan, harga barang, pendapatan musiman, dan aliran uang keluar negeri.

Triwahyudi (2002) menyebutkan manfaat pariwisata seperti diversifikasi produk ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pembangunan fasilitas, peluang bisnis baru, percepatan pembangunan permukiman, peningkatan transportasi, akses pendidikan, pengelolaan lingkungan, interaksi sosial, dan peningkatan infrastruktur. Yoeti (2008) menambahkan bahwa pariwisata mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan prasarana, industri baru, produksi pertanian, permintaan kerajinan lokal, peningkatan devisa, penyediaan lapangan kerja, percepatan pembangunan wilayah terpencil, dan efek penggandaan ekonomi.

Secara umum, pariwisata membawa dampak positif dan negatif yang harus dikelola dengan baik agar manfaatnya maksimal dan dampak buruk dapat diminimalkan. Keterlibatan masyarakat dan perencanaan yang matang sangat penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis dan mendalam suatu fenomena dengan mengumpulkan data detail melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian adalah peran pemimpin informal Etnis Suku Bajau dalam pengembangan pariwisata di Kepulauan Derawan, meliputi peran sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator, serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Sumber data terdiri dari data primer (hasil wawancara dan observasi langsung) dan data sekunder (dokumen dan literatur

terkait). Informan dipilih secara purposive sampling, yaitu mereka yang dianggap paling relevan, seperti kepala kelompok Suku Bajau, anggota kelompok, dan masyarakat Bajau.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara (tatap muka langsung), observasi (pengamatan langsung, baik partisipatif maupun tidak terstruktur), dan dokumentasi (analisis dokumen dan foto). Analisis data dilakukan melalui empat tahap: pengumpulan data, kondensasi (penyederhanaan) data, penyajian data (dalam bentuk narasi atau grafik), dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola, keteraturan, serta hubungan sebab-akibat yang ditemukan selama penelitian.

RESULT AND DISCUSSION

Peran Pemimpin Informal Etnis Suku Bajau dalam Pengembangan Pariwisata di Gugusan Kepulauan Derawan Kabupaten Berau

Peran pemimpin informal Etnis Suku Bajau di Gugusan Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau sangat penting dalam mempercepat dan mengarahkan pengembangan pariwisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemimpin informal, tokoh masyarakat, dan warga setempat, mereka berperan besar dalam mempengaruhi dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Pemimpin informal mengorganisir kegiatan pariwisata seperti acara budaya dan pengelolaan destinasi, serta mengajak masyarakat menjaga alam dan budaya. Selain itu, sebagai figur yang dihormati, mereka berperan menyelesaikan konflik terkait pembagian manfaat ekonomi, dampak sosial budaya, dan perubahan gaya hidup akibat pariwisata, sehingga pengembangan dapat berjalan inklusif dan adil. Pembahasan berikut akan menguraikan peran pemimpin informal tersebut secara lebih rinci.

1. Motivator

Pemimpin informal Etnis Suku Bajau berperan penting sebagai motivator dalam pengembangan pariwisata di Kepulauan Derawan. Mereka mendorong partisipasi masyarakat, menjaga budaya dan lingkungan, serta menjadi penghubung antara warga dan pemerintah. Tradisi seperti Mag'jamu tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga menjadi daya tarik wisata yang mendukung ekonomi lokal. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan dan informasi membatasi efektivitas pemimpin informal dalam memotivasi masyarakat. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata masih rendah, dan manfaat ekonomi belum dirasakan secara merata. Keterbatasan strategi komunikasi dan pendekatan juga menyebabkan resistensi terhadap perubahan, sehingga pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pemimpin informal melalui pelatihan dan kolaborasi diperlukan agar mereka mampu memberikan motivasi yang efektif, mengedukasi masyarakat, dan mengatasi tantangan sosial dalam pengembangan pariwisata.

2. Fasilitator

Pemimpin informal Etnis Suku Bajau berperan sebagai fasilitator utama dalam pengembangan pariwisata di Kepulauan Derawan. Mereka menjembatani komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan pengelola wisata, serta memastikan aspirasi warga tersampaikan dan diterima. Melalui tradisi Mag'jamu, pemimpin informal menciptakan ruang musyawarah yang inklusif, memperkuat kebersamaan, dan menanamkan nilai gotong royong dalam pengambilan keputusan. Peran ini tidak hanya mendorong partisipasi aktif masyarakat

dalam kegiatan pariwisata, tetapi juga menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Dengan demikian, pemimpin informal Bajau berkontribusi signifikan dalam memastikan pengembangan pariwisata berjalan secara kolektif, adil, dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

3. Mobilisator

Pemimpin informal Etnis Suku Bajau berperan sebagai mobilisator dalam pengembangan pariwisata di Kepulauan Derawan dengan menggerakkan, mengorganisir, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui forum musyawarah kolektif seperti Mag'jamu. Peran ini memperkuat keterlibatan warga dalam identifikasi potensi wisata, pengelolaan sumber daya, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia terlatih dan menurunnya partisipasi generasi muda dalam tradisi lokal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemimpin informal mendorong pelatihan, edukasi, dan kolaborasi lintas pihak agar masyarakat lebih siap menghadapi peluang dan tantangan pariwisata. Dengan demikian, pemimpin informal memastikan pengembangan pariwisata berjalan inklusif, berkelanjutan, dan tetap berakar pada nilai budaya lokal.

Faktor-Faktor Pendukung Peran Informal Dalam Pengembangan Pariwisata di Gugusan Kepulauan Derawan Kabupaten Berau Analisis pengelolaan pariwisata memerlukan tolok ukur yang jelas untuk menilai efektivitas keterlibatan aktor lokal, khususnya pemimpin informal. Salah satu tolok ukur penting adalah identifikasi faktor pendukung peran informal dalam pengembangan pariwisata. Faktor-faktor ini menentukan keberhasilan program dan membantu mengantisipasi tantangan selama proses pengembangan. Strategi dasar pembangunan pariwisata di Kepulauan Derawan menekankan

pentingnya peran informal dalam pengelolaan pariwisata sebagai kunci keberhasilan pembangunan tersebut.

1. Prasarana Wisata

Faktor pendukung dan penghambat peran pemimpin informal etnis Bajau dalam pengembangan pariwisata di Gugusan Kepulauan Derawan sangat dipengaruhi oleh kondisi prasarana wisata. Pemimpin informal berperan penting dalam menggerakkan masyarakat dan memfasilitasi partisipasi, namun keberhasilan mereka terbatas oleh akses transportasi yang sulit dan infrastruktur yang kurang memadai di Pulau Maratua, Kakaban, dan Sangalaki. Keluhan wisatawan terkait akses jalan dan masalah sampah di pulau-pulau tersebut menunjukkan perlunya perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Berau untuk memperbaiki fasilitas dan mendukung kelancaran pariwisata.

2. Sarana Wisata

Secara umum, kualitas dan kuantitas sarana wisata di Kabupaten Berau masih kurang memadai, terutama fasilitas penting seperti toilet, toko jajanan, dan mushollah. Seorang pengunjung lokal menyatakan bahwa fasilitas seperti toilet di Pulau Kakaban perlu segera diperbaiki, mengingat pengunjung harus membayar tiket masuk namun fasilitas dasar tersebut masih kurang memadai.

3. Kualitas Sumber Daya Baik Itu Sumber Daya Alam Maupun Sumber Daya Manusia Pelaku Pembangunan Pariwisata di Kepulauan Derawan

Ketersediaan tim pengelola pariwisata bahari di Kabupaten Berau masih terbatas, terutama dalam kemampuan berbahasa asing. Dengan meningkatnya wisatawan internasional, kebutuhan tenaga kerja yang fasih berbahasa asing semakin mendesak. Mba Hani, manajer operasional PT. Maratua

Paradise, menyatakan bahwa kendala utama adalah minimnya staf yang menguasai bahasa seperti China, Jepang, dan Korea, meskipun kemampuan bahasa Inggris sudah tersedia. Hal ini menjadi tantangan dalam pengelolaan wisatawan asing di resort mereka.

4. Regulasi

Ketersediaan tim pengelola pariwisata bahari di Kabupaten Berau masih terbatas, terutama dalam kemampuan berbahasa asing. Dengan meningkatnya wisatawan internasional, kebutuhan tenaga kerja yang fasih berbahasa asing semakin mendesak. Mba Hani, manajer operasional PT. Maratua Paradise, menyatakan bahwa kendala utama adalah minimnya staf yang menguasai bahasa seperti China, Jepang, dan Korea, meskipun kemampuan bahasa Inggris sudah tersedia. Hal ini menjadi tantangan dalam pengelolaan wisatawan asing di resort mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian pengelolaan wisata bahari di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, pemimpin informal, khususnya pemangku adat suku Bajau, memiliki peran strategis dalam memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata dan pelestarian tradisi. Mereka efektif mendorong partisipasi dalam pengelolaan destinasi, pelestarian budaya, dan kegiatan ekonomi pariwisata, seperti pengembangan tradisi Mag'jamu sebagai daya tarik wisata budaya yang memperkuat identitas lokal. Namun, keterbatasan pelatihan dan kemampuan komunikasi menghambat efektivitas mereka dalam memotivasi masyarakat, menjelaskan manfaat pariwisata, serta mengatasi resistensi sosial. Selain itu, pemimpin informal berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan

pelaku wisata, serta sebagai mobilisator yang menggerakkan masyarakat untuk aktif berpartisipasi, mengikuti pelatihan, dan mengembangkan usaha pariwisata berbasis lokal.

Dalam menganalisis pengelolaan pariwisata, diperlukan tolok ukur berupa faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat proses tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ini sangat memengaruhi pengelolaan destinasi wisata bahari di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dari pembahasan, terdapat empat faktor utama yang menjadi penghambat, dengan prasarana dan sarana wisata sebagai faktor paling signifikan dalam pengelolaan wisata bahari di wilayah tersebut.

SARAN

Untuk mengoptimalkan peran pemimpin informal Etnis Suku Bajau dalam pengembangan pariwisata Kepulauan Derawan, diperlukan pendekatan multiprong. Pertama, peningkatan kapasitas pemimpin informal melalui pelatihan komprehensif sangat penting. Pelatihan ini harus mencakup keterampilan komunikasi dan motivasi, pemahaman manajemen pariwisata dasar, literasi digital, serta penyelesaian konflik. Akses informasi yang merata juga krusial. Kedua, penguatan infrastruktur dan sarana pariwisata menjadi prioritas, dengan perbaikan aksesibilitas dan transportasi antar pulau, peningkatan fasilitas dasar seperti toilet dan pengelolaan sampah efektif. Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan regulasi sangat vital. Ini berarti pengembangan SDM berbahasa asing dan penguatan kerja sama antar pihak untuk menyusun regulasi pariwisata yang jelas dan inklusif. Terakhir, pelibatan generasi muda dan pelestarian budaya melalui program edukasi dan pengembangan

produk wisata berbasis budaya sangat diutamakan. Dengan langkah-langkah terpadu ini, pariwisata Derawan dapat berkembang secara inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh komunitas.

REFERENSI

Books:

- Cohen, E. (dalam Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S.). (2009). *Sosiologi Pariwisata: Kajian Sosiologis terhadap Struktur, Sistem, dan Dampak Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Hadinoto, K. (1996). *Pengembangan Tempat Wisata dan Daya Tarik Wisata*. Jakarta: PT Gramedia.
- Merton. *Teori-teori Sosiologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Rivai, V. (2004). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia
- Soerjono Soekanto. (1983). *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Suwantoro, G. (1997). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Robinson, M. (2018). *Leadership in Community Development*.
- Wirawan, I. B. (2014). *Kepemimpinan Informal dalam Organisasi*